

# Dimensi Sosial Pelaksanaan Tahap Awal Pembangunan Jaringan Listrik Transmisi Tegangan Tinggi Di Kabupaten Bengkayang

Usman A. Gani<sup>1</sup>, Oekan S Abdoellah, Budhi Gunawan, Opan S. Swartapradja<sup>2</sup>

## Abstrak

Pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dalam memberikan keuntungan sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya terdapat masalah sosial seperti proses pembebasan lahan yang tidak mudah, pembatasan pemanfaatan lahan pada ruang bebas, dan turunnya nilai lahan dibawah jaringan yang berdampak pada keresahan sosial masyarakat. Penelitian ini menganalisis dimensi sosial proses pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang. Secara khusus pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena sosial yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh pembangunan tersebut secara holistik dan mendalam. Temuan studi memperlihatkan bahwa proses pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang dipengaruhi oleh sistem interrelasi sosial antara PLN sebagai pemilik proyek, kepemimpinan lokal yang berpengaruh dan masyarakat pemilik lahan. Sistem penguasaan lahan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai komunal, mekanisme alamiah dalam pemanfaatan lahan dan relasi sosial dalam keragaman etnik dengan etnik dayak yang dominan yang identik dengan sistem kepemimpinan lokalnya. Sebaliknya, pembangunan tersebut berpengaruh terhadap integrasi sosial masyarakat dalam beradaptasi terhadap proses pembangunan tersebut. Adapun keresahan sosial masyarakat lebih diakibatkan oleh adanya pembatasan pemanfaatan lahan dalam wilayah ruang bebas. Dengan demikian, pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang dipengaruhi dan mempengaruhi sistem interrelasi sosial masyarakat dalam wilayah Serawak Bengkayang.

**Kata kunci :** *Dimensi sosial pembangunan, relasi sosial, proses pembebasan lahan.*

## Pendahuluan

Pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi, didasari oleh kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat, sehingga pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi merupakan kegiatan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat terkait kebutuhan energi listrik. Sehingga infrastruktur ini menjadi penopang pembangunan berkelanjutan yang berfungsi sebagai infrastruktur vital dan strategis dalam mendukung pilar ekonomi dan sosial masyarakat (Ball, 1989). Terlebih, pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi akan mendorong laju pertumbuhan

industrialisasi dalam suatu wilayah yang dapat memberikan keuntungan sosial (*social benefit*) kepada masyarakat. Namun jika dilihat dari berbagai fenomena masalah sebagai dampak pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi pada suatu kawasan wilayah masyarakat, maka pembangunan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif berupa biaya sosial (*social cost*) yang tinggi dalam bentuk pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut (Boyer, 1978).

1 Corresponding author, Universitas Tanjungpura, usmanagani@gmail.com

2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Kebijakan pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi lebih pada kebijakan yang terpusat dan menjadi otoritas pemerintah, sehingga dalam proses pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi terkesan kurang melibatkan masyarakat, terutama masyarakat lokal dalam wilayah tersebut (Devine dkk., 2005). Fenomena masalah pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi sebenarnya sudah dapat terlihat sejak tahap penyuluhan dan penjelasan rencana proyek. Demikian juga pada proses penentuan rencana jalur dan lokasi tapak menara sangat sering menimbulkan benturan dengan masyarakat lokal, yang berlanjut pada proses pembebasan lahan, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan aksi penolakan masyarakat (Walsh, et al., 1993). Akibat penyuluhan dan penjelasan yang kurang maksimal, muncul persepsi dan pemahaman masyarakat yang beragam dan mengarah kepada persepsi yang negatif terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan tersebut (Jay, 2004).

Dari berbagai fenomena masalah sosial masyarakat terhadap pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi, faktor yang paling berpengaruh adalah dimensi karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan sosial yang masuk dalam wilayah ruang bebas dalam jangka panjang (Mitchell, 1976). Memasuki tahun 1990 an, kajian-kajian dasar tentang dampak sosial terkait jaringan transmisi tegangan tinggi baru mulai banyak dilakukan. Kajian awal terhadap pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi yang berbasis dimensi karakteristik sosial budaya dan kelembagaan masyarakat sudah mulai dikembangkan (Tikalsky, dkk., 2007).

Sehingga perlu kajian yang mendalam terhadap permasalahan akibat semakin sulitnya menempatkan saluran transmisi bertegangan tinggi yang bebas dari lahan dan permukiman masyarakat (Gregory, 1996). Sehingga direkomendasikan, perencanaan pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi sedapat mungkin di luar kawasan lahan dan

permukiman penduduk. Namun karena pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan yang meningkat sangat pesat, menyebabkan lahan yang tersedia semakin sempit. Akibatnya pembangunan tersebut tidak dapat menghindari wilayah permukiman dan lahan masyarakat, sehingga berpotensi memberikan dampak sosial di masyarakat (Edelstein, 1988). Hal ini dapat berdampak pada konflik pemanfaatan ruang dan wilayah antara jaringan transmisi tegangan tinggi dengan pemanfaatan ruang dan wilayah di sekitarnya, karena tidak terintegrasinya sarana dan prasarana infrastruktur lain dalam tata ruang wilayah yang baik (Colwell, 1990).

Pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi membutuhkan lahan dan bentangan wilayah yang cukup luas. Dimensi sosial dalam pemanfaatan lahan dalam kawasan pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan, karena sangat berpengaruh terhadap wilayah ruang bebas dan lingkungan sekitar (Irawati, 2009). Fenomena masalah sosial yang sering muncul adalah masalah sosial terkait proses pembebasan lahan, hutan maupun permukiman masyarakat di wilayah pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut. Fenomena ini telah menjadi isu Nasional, seperti isu ganti rugi lahan dan menurunnya nilai lahan di bawah jaringan. Fenomena masalah sosial tersebut dipahami sebagai salah dimensi yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi dalam suatu wilayah (Listra, 2010).

Fenomena masalah lain terkait dengan pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi adalah dimensi karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi. Sehingga perlu pendekatan dan partisipasi sosial masyarakat yang baik terhadap pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut (Devine et al., 2009 ; Quah et al., 1998). Menurut (Devine-Wright et al., 2009), dalam proses perencanaan pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi lebih memperhatikan dan

mengintegrasikan dimensi karakteristik sosial dan budaya masyarakat lokal dalam setiap tahapan proses pembangunan tersebut. Perlu dibangun pola penyuluhan, penjelasan, musyawarah dan pendekatan yang baik terhadap pemegang hak atas lahan dan masyarakat disekitar wilayah pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut.

Sebagaimana fenomena-fenomena dari berbagai masalah penelitian tersebut diatas yang banyak dilakukan ditempat lain, namun penelitian ini juga sangat bernilai untuk dilakukan di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia, karena kajian-kajian tentang fenomena itu belum ada di Kalimantan Barat, dikarenakan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) baru kali ini terbangun di Kalimantan Barat. Dalam konteks ini permasalahan yang terjadi bisa sama, tetapi karakteristik sosial masyarakatnya berbeda dan sistem penguasaan lahan juga berbeda dengan yang di pulau Jawa atau ditempat lainnya. Sehingga benefitnya menjadi variasi terhadap kajian-kajian sosial aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi, menjadi spesifik dan tergantung pada karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

Sehubungan dengan dimensi sosial terkait dengan pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang memperhatikan dimensi sosiologis untuk melihat bagaimana keterkaitan interrelasi sosial masyarakat sepanjang wilayah Serawak Bengkayang terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang di Kabupaten Bengkayang. Secara khusus, yang dianalisis adalah dimensi sosial yang berpotensi dapat mempengaruhi dan dampak sosial yang dipengaruhi oleh pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak-Bengkayang di Kabupaten Bengkayang.

## Metode

Penelitian ini dilakukan di wilayah Serawak Bengkayang, sepanjang garis sempadan Jalan Negara dari Bengkayang menuju Perbatasan Serawak yang meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu : Kecamatan Lumar (Desa Magmagan, Tiga Berkat, Belimbing dan Lamoda), Kecamatan Ledo (Desa Lesabela dan Jesape), Kecamatan Sanggau Ledo (Desa Bange, Gua dan Sango), Kecamatan Seluas (Desa Sahan, Mayak dan Seluas) dan Kecamatan Jagoi Babang (Desa Jagoi).



**Gambar 1.**

Peta Lokasi Penelitian di Kabupaten Bengkayang

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat interrelasi fenomena masalah sosial dan budaya masyarakat dalam

dimensi sosiologi dan pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang secara holistik dan

mendalam, dengan mengumpulkan data yang saling terkait dengan dimensi sosial yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti proses pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut untuk melihat dan menangkap gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan sejumlah informan di tingkat Kabupaten hingga tingkat Kecamatan dan Desa yang mencakup : (1) Pihak-pihak yang mengambil keputusan (*decision maker*) dan memiliki pengetahuan terhadap masalah yang diteliti; (2) Pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan memahami dengan jelas obyek yang diteliti, dan mempunyai kemampuan intelektual untuk memberikan deskripsi serta mempunyai akses langsung kepada masyarakat; (2) Pihak-pihak yang terlibat langsung, yang memahami, mengetahui, dan mengalami sendiri serta terlibat langsung terhadap rencana pembangunan infrastruktur jaringan transmisi.

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengamatan (*observation*), yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dilokasi penelitian, baik di kecamatan maupun di desa sepanjang wilayah Serawak Bengkayang.

Dimensi-dimensi yang diamati meliputi pengamatan terhadap proses pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang yang meliputi : inventarisasi dan identifikasi atas lahan dan tanam tumbuh, penyuluhan dan penjelasan kepada masyarakat pemegang hak atas lahan, musyawarah harga dengan para pemegang hak atas lahan, verifikasi administrasi terhadap status kepemilikan lahan dan proses pembayaran ganti rugi lahan kepada para pemegang hak atas lahan yang dibebaskan untuk tapak menara dan wilayah ruang bebas.

### Hasil dan Pembahasan

#### *Pelaksanaan Tahap Awal Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi Serawak Bengkayang*

Pembangunan jaringan interkoneksi transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 kV Serawak Bengkayang saat ini masih pada pelaksanaan tahap awal pembangunan, dimana kegiatan Pra Konstruksi sudah dimulai sejak tahun 2009 yang melintasi wilayah dua Negara, Indonesia dan Malaysia sepanjang 122 Km, yaitu dari Bengkayang di Kalimantan Barat hingga ke Mambong di Serawak.



**Gambar 2.**

Diagram Satu Garis Jaringan Interkoneksi Gardu Induk (GI) Serawak dan Gardu Induk (GI) Bengkayang dengan Jaringan SUTET 275 kV

Sepanjang 81,434 KM diantaranya berada di wilayah Serawak Bengkayang Kalimantan Barat. Interkoneksi ini atas kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan Sarawak Energy Berhad (SEB) dengan pokok-pokok kerjasama antara dua perusahaan listrik ini

Pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang, meliputi proses pembebasan

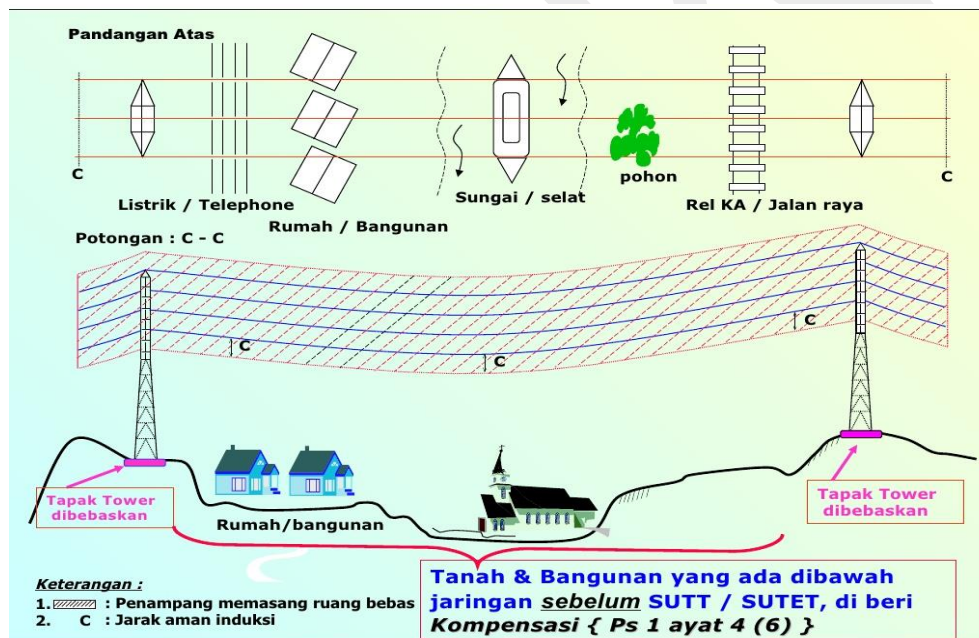
dituangkan dalam bentuk *Term Sheets of West Kalimantan – Sarawak Power*. Proyek ini direncanakan sudah dapat beroperasi pada pertengahan 2014, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Kalimantan Barat.

lahan. Dimana proses pembebasan lahan tersebut mengacu pada Perpres (No. 36 Tahun 2005) dan Permen Agraria No. 1 Tahun 1994,



tentang mekanisme dan ketentuan pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum : (1) Inventarisasi dan identifikasi atas lahan, tanam tumbuh, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan lahan yang akan dibebaskan untuk keperluan tapak tower dan ruang bebas; (2) Penyuluhan dan Penjelasan kepada masyarakat pemegang hak atas lahan mengenai rencana dan tujuan pembebasan tanah dalam bentuk konsultasi publik melalui tatap muka yang dilakukan per desa dan per kecamatan; (3) Musyawarah dengan para pemegang hak atas lahan dengan PLN (Persero) yang dimediasi oleh Camat, Kepala Desa dan Tokoh Adat setempat untuk

menaksir dan mencari kesepakatan besarnya ganti kerugian atas lahan yang akan dibebaskan; (4) Verifikasi administrasi terhadap status kepemilikan yang meliputi Sertifikat pemilik, SKT, KTP Pemilik, surat penyerahan, surat kuasa ahli waris dan dokumen yang mendukungnya; (5) Pembayaran ganti rugi kepada para pemegang hak atas lahan dan tanam tumbuh yang ada di atas lahan tersebut, dan membuat berita acara penyerahan hak atas tanah, mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompoten.



**Gambar 3.**

Lahan dan Bangunan yang Dibebaskan  
untuk Tapak Menara dan Ruang Bebas (*Right of Way*)

Adapun kebutuhan lahan untuk tapak menara dan ruang bebas (*right of way*) pada bentangan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang diperoleh dari lahan masyarakat yang sebagian besar berstatus

kepemilikan secara individual, selebihnya terdapat milik ulayat dan lahan hutan produksi. Secara rinci jumlah pemilik lahan secara individual dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.**  
 Pemilik Lahan untuk Tapak Tower dan Wilayah Ruang Bebas (*Right of Way*)  
 di Lokasi Pembangunan SUTET 275 kV Serawak - Bengkayang

No	Kecamatan	Desa	Pemilik Lahan Tapak Tower	Pemilik Lahan Terkena ROW	Jumlah Pemilik Lahan
1	Lumar	Magmagan	16	21	37
		Tiga Berkat	13	17	30
		Belimbing	9	23	32
		Lamoda	17	21	38
2	Ledo	Lesabela	10	16	26
		Jesape	15	23	38
3	Sanggau Ledo	Bange	7	22	29
		Gua	19	39	58
		Sango	13	48	61
4	Seluas	Sahan	17	37	54
		Mayak	22	50	72
		Seluas	18	37	55
5	Jagoi Babang	Jagoi	15	39	54
Jumlah			<b>191</b>	<b>393</b>	<b>584</b>

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat

Pada Tabel 1 terlihat, pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang sudah bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat lokal sebanyak 584 (lima ratus delapan puluh empat) warga masyarakat sebagai pemegang hak atas lahan untuk tapak menara dan tanam tumbuh pada wilayah ruang bebas (*right of way*). Sehingga kajian dimensi sosial ini sebagai analisis sosial terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut, sebagai aktivitas proyek yang berpengaruh secara eksploitatif pada sumber daya alam dengan penggunaan

lahan dan hutan yang cukup luas, yaitu sekitar 150 (seratus lima puluh) hektar untuk tapak tower dan sekitar 300 (tiga ratus) hektar sebagai wilayah ruang bebas atau *right of way* (ROW). Ekspansi proyek tersebut memasuki wilayah yang didominasi oleh wilayah adat penduduk lokal (*indigenous people*) di pedalaman, yang berpengaruh terhadap "*ruang hidup*" masyarakat setempat. Sehingga terdapat dimensi-dimensi sosial yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang seperti yang digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 4.** Dimensi Sosial yang Berpengaruh dan Dipengaruhi oleh Pelaksanaan Tahap Awal Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi Serawak Bengkayang

Pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi yang berdimensi sosial dan kelembagaan masyarakat didasari atas integrasi antara dimensi teknis dan dimensi sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan pembangunan dilakukan dengan menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek pembangunan dalam bentuk peran dan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat setempat. Dengan demikian dimensi sosial yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang dideskripsikan sebagai berikut :

### ***Dimensi Sosial yang Berpengaruh pada Pelaksanaan Tahap Awal Pembangunan***

#### ***Karakteristik Sosial dan Budaya Masyarakat***

Dalam dimensi sosial budaya masyarakat, dimensi yang paling berpengaruh adalah interrelasi sosial masyarakat terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang adalah sistem relasi sosial yang baik dalam masyarakat (masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelembagaan adat dan aparat desa) yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah perdesaan. Dengan demikian faktor yang berpengaruh terhadap proses pembangunan tersebut adalah relasi triangulasi yang baik dan seimbang antara : (1) PLN (Persero) sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur jaringan listrik; (2) Pemimpin formal dan pemimpin lokal (Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat) yang dapat menjaga sistem relasi sosial yang baik; (3) Masyarakat selaku pemegang hak atas lahan yang akan dibebaskan untuk tapak tower.

Demikian juga dimensi keragaman etnik, berpengaruh terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang yang dibangun dalam wilayah yang dominan masyarakat lokal etnik Dayak. Dari keragaman etnik, terjalin interaksi sosial antar etnik yang baik dan harmonis, dimana masyarakat lokal (etnik dayak) maupun masyarakat pendatang sangat

menghormati dan menghargai kepala desa dan tokoh adatnya, sehingga masyarakat setempat cukup solid integratif dalam peran dan partisipasinya terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Selain ini, dalam kultur budaya dominan etnik Dayak, terdapat nilai-nilai pranata sosial yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut, seperti mekanisme alamiah yang digariskan oleh kepercayaan nenek moyang masyarakat setempat secara turun temurun dalam pemanfaatan lahan dan menjaga kelestarian alam. Terdapat aspek religi, norma dan etika (seperti mohon petunjuk dan memberi persembahan pada saat menebang pohon saat survei lokasi dan pembersihan lahan). Hal ini dikarenakan terdapat relasi yang sangat kuat dan menyatu antara manusia dan alam yang tidak dapat dipisahkan, sehingga manusia tidak dapat bertindak semaunya terhadap alam dan lingkungannya.

Dimensi sosial budaya lain yang berpengaruh adalah nilai-nilai komunal dalam penguasaan dan kepemilikan. Pada wilayah Serawak Bengkayang, terutama di wilayah perkampungan sepanjang garis sempadan Jalan Negara dari Bengkayang hingga perbatasan Serawak, masih terdapat kekuatan nilai-nilai komunal terhadap lahan, walaupun saat ini sudah mulai terdegradasi secara alamiah sebagai dampak pembangunan di berbagai setoral di wilayah pedesaan tersebut, seperti perkebunan, industri perikanan dan perdagangan antar Negara, sehingga penguasaan lahan masyarakat lebih cenderung secara individual atau perorangan. Namun di desa-desa yang relatif masuk ke pedalaman dari garis sempadan jalan Negara, masih terasa nilai-nilai komunal terhadap penguasaan dan penggunaan lahan.

#### ***Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat***

Dari dimensi kepemimpinan, terdapat dua kelompok kepemimpinan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang adalah : (1) Kepemimpinan formal, pelaksanaan tahap awal pembangunan

jaringan listrik ini sangat dipengaruhi oleh dukungan Pemerintah Propinsi (Ijin Prinsip), Bupati (Ijin Penetapan Lokasi) sampai Camat dan Kepala Desa yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di sepanjang wilayah Pembangunan jaringan transmisi tegangan Tinggi Serawak Bengkayang. Satuan tugas pelaksana di desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat bekerja memberikan penyuluhan dan penjelasan kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan jaringan tegangan tinggi tersebut; (2) Kepemimpinan lokal, terdiri dari peran dan partisipasi tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam proses pembebasan lahan. Demikian juga secara kelembagaan, dimana lembaga adat yang sangat berperan dan berpengaruh dalam menjaga sistem relasi sosial yang baik dalam masyarakat dalam peran dan partisipasi terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan tersebut. Selibhnya, lembaga adat berperan dalam menjaga dan melindungi masyarakat dari dampak-dampak ekspansi pelaksanaan pembangunan tersebut. Sehingga kedua kelompok kepemimpinan dalam masyarakat sangat berperan dan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang.

Selain dari dimensi kepemimpinan, yang lebih penting adalah partisipasi sosial masyarakat (*social participation*) yang ditumbuhkan melalui partisipasi langsung dalam wadah penyuluhan, penjelasan dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan (*community decision making*) yang berhubungan dengan implementasi proses pembebasan lahan untuk tapak menara. Demikian juga peran dan partisipasi tokoh adat dan tokoh masyarakat, yang berfungsi sebagai orang yang berpengaruh (*community leader*) yang mempunyai peranan penting dalam menjaga relasi sosial yang baik antara PLN (Persero) dengan masyarakat secara organisasi dan kelembagaan (*community organizations*). Sehingga, peran dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*) dan rasa memiliki

(*sense of belonging*) terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut (Kodoatie, 2005) sejalan.

#### *Penguasaan dan Kepemilikan Lahan*

Sistem Penguasaan lahan dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan tahap awal pembangunan tersebut, terutama dalam proses pembebasan lahan bersinggungan dengan sistem penguasaan lahan-lahan berikut : (1) Lahan masyarakat yang sangat penting sebagai sumber penghidupan yang cukup luas (150 hektar untuk tapak tower dan 300 hektar untuk ruang bebas) yang membentang disepanjang Serawak Bengkayang. Begitu pentingnya lahan bagi masyarakat, maka ganti rugi lahan tidak cukup hanya dengan nilai nominal harga lahan saja, tetapi harus dihitung berapa kerugian materi yang akan hilang dalam kurun waktu yang tak terbatas; (2) Lahan wilayah bebas internasional (*Free Zone*) atau lahan tidak ada hak milik (*no man's land*), bebas dari hak-hak perdata, namun fakta di lapangan, lahan ini semua dikuasai oleh masyarakat setempat sebagai hak ulayat atau tanah adat secara turun temurun. Penghidupan masyarakat juga tergantung pada lahan yang berfungsi sebagai lahan pertanian, perkebunan dan hasil hutan. Ganti rugi lahan dilakukan atas persetujuan pemerintah daerah setempat dengan nilai kompensasi tanam tumbuh yang diberikan kepada petani penggarap lahan tersebut; (3) Lahan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang terdapat di Kecamatan Lumar cukup luas yang bersentuhan dengan pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut. Proses pembebasan lahan untuk tapak menara dilakukan dengan ketentuan tidak merubah status, peruntukan dan fungsi pokok dari kawasan hutan tersebut, hal ini dilakukan dengan ijin pinjam pakai yang diberikan kepada PLN (Persero) dengan kewajiban memberikan kompensasi sejumlah dana sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kehutanan dan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat



dan lembaga adat untuk keperluan pembiayaan kegiatan adat dan pelestarian hutan tersebut.

Selain sistem penguasaan lahan, dimensi yang penting adalah status kepemilikan lahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi, karena status kepemilikan sangat berpengaruh terhadap proses ganti rugi kepada pemegang hak atau pemilik atas lahan yang sah sebagai penerima ganti rugi tersebut. Pada proses pembebasan lahan untuk tapak menara, sebagian besar status kepemilikan lahan sudah dominan berstatus hak perorangan, sisanya terdiri dari kepemilikan secara ulayat atau tanah adat. Demikian juga, sudah adat sebagian kecil yang berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), yang lebih didominasi oleh masyarakat pendatang, dengan adanya kesadaran kolektif yang cukup tinggi untuk mengurus kelengkapan administrasi sebagai bukti kepemilikan lahan yang sah. Status kepemilikan lahan sangat berpengaruh pada proses pembebasan lahan. Dimana proses pembebasan lahan hanya dapat dilakukan pada lahan yang jelas status kepemilikannya. Sehingga dengan status kepemilikan yang sah, maka proses pembebasan lahan dapat dilaksanakan dengan baik dengan proses yang baik. Dimana proses pembebasan lahan tersebut mengacu pada Perpres (No. 36 Tahun 2005) dan Permen Agraria No. 1 Tahun 1994, yang dimulai dari survei, inventarisasi dan identifikasi, penyuluhan dan penjelasan, musyawarah, verifikasi dan pembayaran. Semua tahapan tersebut berjalan dengan baik dan lancar, karena adanya peran dan partisipasi masyarakat, baik sebagai pemilik lahan, aparat desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.

Namun demikian, dalam proses pembebasan lahan tersebut, masih ditemukan beberapa konflik kecil yang berhubungan dengan status kepemilikan lahan. Konflik tersebut lebih dikarenakan tumpang tindih kepemilikan, konflik antar keluarga (hak waris) dan pengakuan kepemilikan perseorangan terhadap lahan yang bukan haknya. Konflik kepemilikan lahan tersebut semuanya diselesaikan dengan baik yang di mediasi kelembagaan adat dalam pertemuan adat. Pihak yang kalah dalam

persengketaan lahan dapat menghormati keputusan dari pertemuan adat tersebut. Dengan demikian, tokoh adat dan kepala desa sangat berperan dalam menyelesaikan masalah konflik tersebut dengan baik, adil dan tidak berpihak. Semua kasus konflik kepemilikan lahan tidak pernah sampai pada pihak kepolisian, apalagi ke pengadilan.

### ***Dimensi Sosial yang Dipengaruhi oleh Pelaksanaan Tahap Awal Pembangunan Keresahan dan Integrasi Sosial***

Pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi berpengaruh terhadap keresahan sosial masyarakat. Keresahan lebih diakibatkan adanya pembatasan penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam wilayah ruang bebas, dikarenakan tinggi bangunan dan tamanam tidak boleh melebihi ketinggian 3 (tiga) meter, sehingga wilayah tersebut menjadi kering dan panas dengan angin yang kencang di musim kemarau. Dimensi lain yang menyebabkan keresahan sosial juga diakibatkan karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan dampak radiasi medan elektromagnetik pada pengoperasian jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut. Selebihnya khawatir terhadap bahaya disekitar lokasi dekat tapak menara, misalnya akibat gangguan fondasi menara karena perubahan struktur tanah, putusnya kabel pada bentangan penghantar yang panjang, dan kekhawatiran apabila terjadi angin, hujan badai dan sambaran petir.

Selain keresahan sosial, pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut juga berpengaruh terhadap integrasi sosial masyarakat, karena terbagun nilai dan rasa kebersamaan dan kekompakan dalam masyarakat (masyarakat, tokoh adat dan tokoh masyarakat) untuk beradaptasi dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan proses pembebasan lahan. Secara umum masyarakat tidak terpecah belah dan relasi sosial masyarakat yang terbangun cukup solid dan integratif dalam menerima proses pembangunan tersebut. Terdapat dua kelompok masyarakat yang dapat menerima pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut. *Pertama* adalah

kelompok yang menjual lahannya karena memerlukan uang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. *Kedua* adalah kelompok yang secara sadar melepaskan lahannya karena masyarakat tidak dapat menolak proses pembangunan tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umum. Sebaliknya masyarakat cukup solid dan integratif mendukung pelaksanaan proyek, karena dengan adanya proyek jaringan transmisi tegangan tinggi ini, pelayanan penyediaan energi listrik nantinya akan semakin baik bagi masa depan mereka.

### ***Sumber Penghidupan Masyarakat***

Pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang berpengaruh terhadap akses masyarakat pada sumber daya alam. Pengaruh terhadap akses masyarakat terjadi pada eksploitasi sumber daya alam dan mata pencaharian tradisional masyarakat selama puluhan tahun, seperti menyempitnya ruang hidup untuk berladang, berkebun, mencari rotan, gaharu, tengkawang madu lebah dan berburu rusa atau babi di hutan karena adanya pembersihan lahan dalam wilayah ruang bebas dan pembatasan pemanfaatan lahan ruang bebas atau *right of way* (ROW) tersebut.

Pengaruh lain dari pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang adalah dimensi perekonomian masyarakat. Dalam jangka pendek, penggunaan uang ganti rugi lahan lebih diperuntukan untuk keperluan biaya anak sekolah, berobat, pernikahan, membangun rumah, membeli kendaraan, dan pembelian barang-barang elektronik untuk keperluan sehari-hari. Namun untuk jangka panjang, uang ganti rugi lahan di pergunakan sebagai modal usaha dan mengembangkan usaha yang sudah ada, seperti membeli lahan kelapa sawit dan kebun karet, ditabungkan di Bank dan di *Credit Union* (CU) untuk masa depan mereka. Demikian juga uang ganti rugi lahan yang diberikan kepada lembaga adat sebagai uang ganti rugi lahan adat (lahan ulayat) lebih dipergunakan untuk keperluan adat, seperti

merehab rumah adat dan kegiatan dari lembaga adat setempat.

Pengaruh lain pelaksanaan tahap awal pembangunan tersebut yang lebih bersifat usaha temporer, seperti jasa kontruksi, jasa buruh, tenaga kerja dan jasa angkutan yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Sedangkan pengaruh jangka panjang, dengan adanya penyediaan energi listrik yang memadai, mata pencaharian masyarakat setempat dapat bergeser ke ruang gerak usaha pada sektor tertier yang berbasis listrik. Sehingga infrastruktur kelistrikan sebagai pendukung utama fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi, yang berpengaruh terhadap perubahan sosial dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

### ***Nilai dan Harga Lahan Setempat***

Pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang yang lebih pada kegiatan proses pembebasan lahan berpengaruh terhadap kenaikan nilai dan harga lahan. Terjadi kenaikan nilai dan harga pasaran (*Market land price*) dari lahan-lahan lain disekitar wilayah tersebut. Karena masyarakat setempat sudah terbiasa dan berpengalaman dengan harga lahan pada saat proses pembebasan lahan, sehingga menjadi referensi terhadap nilai dan harga diwilayah sekitarnya di dalam wilayah sepanjang Serawak Bengkayang tersebut, maupun di Kabupaten Bengkayang umumnya. Namun tidak demikian dengan nilai dan harga lahan pada wilayah ruang bebas, hal ini dikarenakan adanya pembatasan pemanfaatan lahan di sekitar wilayah ruang bebas, sehingga dapat mengurangi minat seseorang untuk membeli lahan tersebut, karena peminat lebih cenderung memilih lahan lain yang tidak memiliki batasan-batasan pemanfaatannya.

## Simpulan

Pembangunan jaringan listrik transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang, sangat dipengaruhi oleh interrelasi sosial dalam keragaman etnik, pranata sosial, nilai komunal, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat yang didominasi oleh karakteristik wilayah pedesaan. Kepemimpinan dan kelembagaan adat sebagai posisi sentral berpengaruh dalam menjaga relasi sosial yang baik untuk mendukung pembangunan tersebut. Selain itu pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang berpengaruh terhadap interrelasi sosial terkait dengan nilai kebersamaan dalam integrasi sosial untuk menyikapi pengaruh pembangunan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal, yang meliputi keresahan sosial akibat dampak pembangunan, pembatasan fungsi lahan dan terganggunya akses terhadap sumber daya alam, yang berpengaruh pada sumber kehidupan.

Dari hasil penelitian ini mendukung konsep yang dirujuk dalam penelitian ini, dengan demikian kontribusi penelitian ini terhadap konsep pengembangan ilmu sosiologi ditunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi dan mempengaruhi interrelasi sosial (hubungan sosial) dalam masyarakat. Interrelasi itu meliputi dimensi sosial seperti keragaman etnik, pranata sosial, nilai-nilai komunal, integrasi sosial, aspek penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya alam yang merupakan interaksi antara pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup dalam konsepsi yang lebih luas mencakup manfaat dan dampak proyek pembangunan infrastruktur.

## Referensi

- Ball, T. 1989. *The Study of The Economic Effects of High Voltage Electrical Transmission Lines on The Market Value of Real Properties*. Unpublished report prepared for the Salt River Project.
- Boyer, J. C., Mitchell B. and Fenton S. 1978. "The Socio-Economic Impacts of Electric Transmission Corridors: a

Comparative Analysis". *The first report by the Royal Commission on Electric Power Planning for Outreach Guidebook*. Waterloo : Published by the Royal Commission on Electric Power Planning and Printed by J.C. Thatcher, Queen's Printer of Ontario.

- Colwell, P. 1990. "Power Lines and Land Value," *The Journal of Real Estate Research*, (1), pp. 117-127.
- Devine-Wright, P. 2005. "Beyond NIMBYism: Towards an Integrated Framework for Understanding Public Perceptions of Wind Energy". *Wind Energy*, vol 8, no. 2, pp.125-139.
- Devine-Wright, H. and Devine-Wright, P. 2009. "Social Representations of Electricity Network Technologies: Exploring Processes of Anchoring and Objectification Through the Use of Visual Research Methods", *British Journal of Social Psychology*, vol 48, no. 2, pp.357-373.
- Edelstein, M. 1988. *Contaminated Communities : The Social and Psychological Impacts of Residential Toxic Exposure*. Boulder, CO : Westview Press.
- Gregory R. and Winterfeldt D. Von, 1996. "The Effect of Electromagnetic Fields From Transmission Lines on Public Fears and Property Values". *Journal of Environmental Management*, 48, pp. 201-214.
- Irawati, Ira., Hadi Nur Cahyo, I Wayan Retnara, Guntur, 2009. "Peran Jaringan Energi Kelistrikan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan". *Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota Menuju Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Berdaya saing, dan Berotonomi*, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Jay, S. 2004. "The Forces Shaping Local Planning Policy on High Voltage Electricity Installations". *The Journal of Environmental Policy and Planning*, vol 6, no. 3, pp.207-226.

- Listra, Andistya Oktaning, 2010. "Analisis Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Peran Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia". *Makalah Ekonomi Lingkungan*. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Mitchell, B. Priddle G.B. 1976. "The Long Term Socio-Economic Impact of An Electrical Power Transmission Corridor on the Rural Environment: Perception and Reality". *Submission to Report by The the Royal Commission on Electrical Planning*. Toronto, Ontario : Published by the Royal Commission on Electric Power Planning.
- Quah, E.and Tan, K.C. 1998. "The Siting Problem of NIMBY Facilities : Cost - Benefit Analysis and Auction Mechanisms". *Environment and Planning*, vol 16, no. 3, pp.255 – 264.
- Tikalsky, Susan M. and Cassandra J. Willyard, 2007. "Aesthetics and Public Perception of Transmission Structures". *Right of Way A Brief History of the Research*. pp. 28-32
- Walsh, E., Warland, R.and Clayton Smith, D. 1993. "Backyards, NIMBYs, and Incinerator Sitings: Implications for Social Movement Theory". *Social Problems*, vol 40, no. 1, pp.25-38.